

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

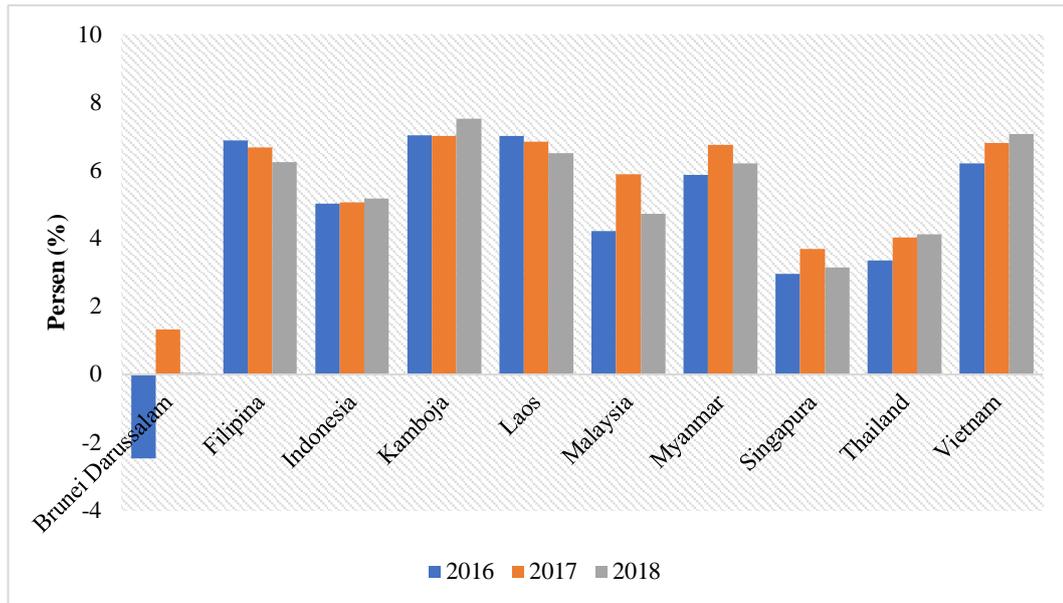
Salah satu indikator penilaian kinerja perekonomian suatu negara atau wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan dampak dari aktivitas perekonomian terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Tujuan pembangunan ekonomi secara global diarahkan pada suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mewujudkan kemakmuran masyarakat dan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi penting untuk dikaji karena setiap negara selalu meningkatkan target pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kesuksesan suatu negara dalam jangka waktu yang panjang. Namun demikian, tidak semua negara bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Hal itu dikarenakan ada berbagai faktor yang salah satunya adalah ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi semua kebutuhannya hanya secara domestik, sehingga mendorong negara-negara melakukan kerja sama ekonomi internasional atau global.

Pada era globalisasi saat ini, hubungan antar negara di dunia semakin erat yang mengakibatkan batas-batas administrasi menjadi tipis. Hal tersebut kemudian mendorong beberapa negara yang memiliki kedekatan letak geografis maupun latar belakang historis yang hampir sama kemudian membentuk kerja sama atau organisasi regional. Organisasi ini berisikan negara-negara di suatu kawasan dengan fokus yang sama yakni salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu organisasi regional tersebut adalah ASEAN (*Association of South East Asia Nations*), yang merupakan organisasi atau himpunan dari sepuluh

negara yang secara geografis terletak di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh *founding father of ASEAN*, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997 serta Kamboja menjadi anggota kesepuluh pada 30 April 1999.

Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut ASEAN bersepakat untuk membentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan tanpa ada hambatan tarif (bea masuk) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara ASEAN. Sehingga diharapkan ASEAN memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN.

Namun demikian, selama kurang lebih 5 dekade ASEAN terbentuk pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN masih saja tidak stabil atau masih fluktuatif. Keadaan tersebut tentu saja bertolak belakang dengan tujuan awal pembentukan ASEAN yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara anggota. Hal itu terlihat pada kurun waktu 2016 – 2018, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN Tahun 2016-2018

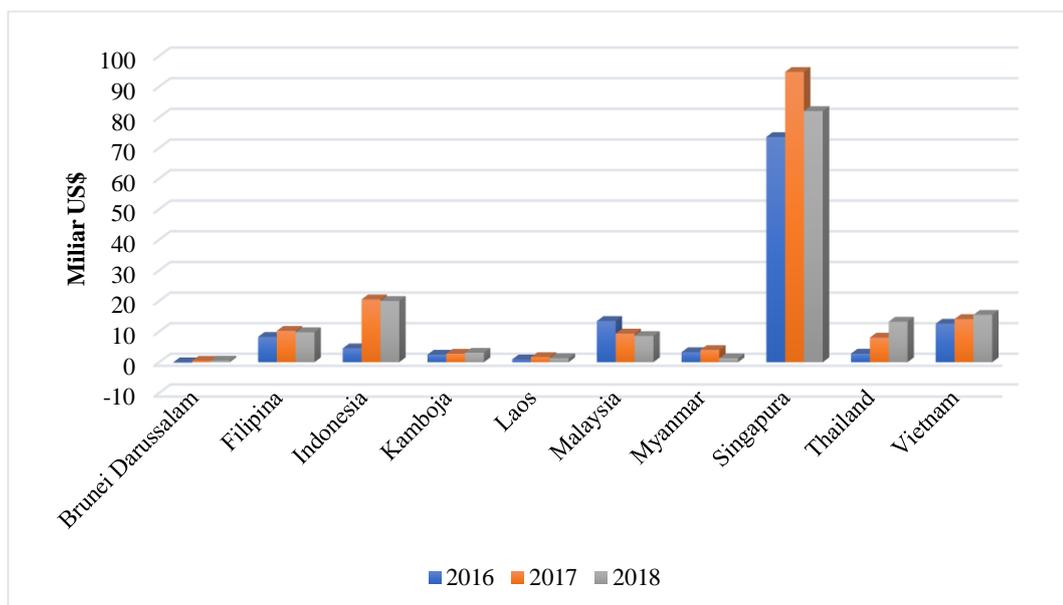
Sumber: GDP Growth Annual Percentage, World Bank.

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN mengalami perubahan yang berbeda, ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Brunei Darussalam mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2016 pertumbuhan ekonominya berada di angka negatif yaitu -2,47%. Lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2017 menjadi 1,33%, namun kembali mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,05%. Selain Brunei Darussalam, pertumbuhan ekonomi Malaysia, Myanmar dan Singapura dalam tiga tahun terakhir juga berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2016 sebesar 4,22% naik menjadi 5,90% di tahun 2017, namun turun menjadi 4,72% di tahun 2018. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Myanmar yang pada 2016 sebesar 5,86% naik menjadi 6,76% di tahun 2017 dan turun menjadi 6,20% pada 2018. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada tahun 2016 berada di angka 2,96% dan meningkat menjadi 3,70% pada tahun 2017 kemudian turun di tahun 2018

menjadi 3,14%. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan berada di kisaran angka 5%, termasuk dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,03% pada tahun 2016, kemudian meningkat sedikit menjadi 5,07% tahun 2017 dan menjadi 5,17% di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Filipina dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun yaitu dari 6,88% di tahun 2016, menjadi 6,68% di tahun 2017 dan kembali turun menjadi 6,24% di tahun 2018. Keadaan tersebut serupa dengan yang dialami oleh Laos, dimana pada tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 7,02% turun menjadi 6,85% pada tahun 2017 dan menjadi 6,50% di tahun 2018. Berbeda dengan Filipina dan Laos, pertumbuhan ekonomi Thailand dan Vietnam dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi Thailand pada 2016 sebesar 3,36% naik menjadi 4,02% di tahun 2017 dan kembali naik menjadi 4,13% pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Vietnam juga mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu 6,21% di tahun 2016 naik menjadi 6,81% pada 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 7,08%. Kamboja menjadi negara anggota ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2016 pertumbuhannya mencapai 7,02% dan turun sedikit menjadi 7,02% di tahun 2017 namun meningkat kembali menjadi 7,52% pada tahun 2018.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN berbeda-beda. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Sehingga perlu diteliti faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN adalah investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan negara berkembang yang membutuhkan dana besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Namun di sisi lain negara berkembang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan pertumbuhan ekonomi negaranya, karena tingkat produktivitas yang masih rendah dan tingginya konsumsi (Yuniasih, 2011). Maka salah satu cara yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk memperoleh suntikan dana adalah dengan menarik investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Dengan masuknya *foreign direct investment* (FDI) maka akan terjadi *multiplier effect* seperti transfer modal, teknologi, kemampuan manajerial dan ilmu pengetahuan. Terjadinya transfer tersebut akan menstimulus produktivitas serta menambah *output* nasional sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



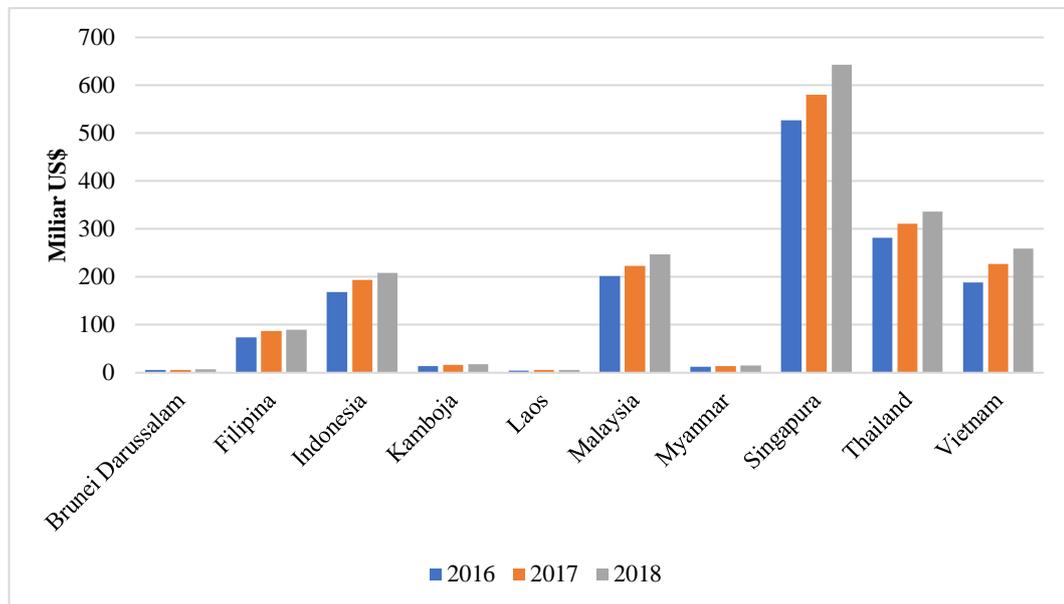
Gambar 1.2 Foreign Direct Investment Negara Asean tahun 2016-2018
 Sumber: Net Inflow Foreign Direct Investment (BoP Current US\$), World Bank

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan FDI di negara-negara ASEAN dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. *Foreign direct investment* (FDI) yang masuk ke Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar dan Singapura pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun di tahun 2018 FDI yang masuk ke tujuh negara tersebut menurun. Sedangkan FDI yang masuk ke Brunei Darussalam, Thailand dan Vietnam mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2016-2018.

Selain investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI), faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah ekspor. Dengan adanya aktivitas ekspor, suatu negara akan memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin meningkat aktivitas ekspor, maka semakin besar devisa yang akan diperoleh negara tersebut. Devisa tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi. Menurut Salvatore (2014) ekspor menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Peningkatan ekspor akan meningkatkan produksi di dalam negeri sehingga membutuhkan input berupa tenaga yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan negara.

Perkembangan ekspor barang dan jasa negara-negara ASEAN sendiri dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya ekspor barang dan jasa semua negara anggota ASEAN mengalami kenaikan. Dalam tiga tahun terakhir Singapura menjadi negara dengan nilai ekspor barang dan jasa tertinggi diantara negara-negara ASEAN, yaitu mencapai US\$ 642 Miliar di tahun 2018. Sedangkan Brunei Darussalam dan Laos menjadi negara ASEAN dengan

nilai ekspor barang dan jasa terendah dalam tiga tahun terakhir yaitu hanya mencapai rata-rata US\$ 6 Miliar setiap tahunnya.



Gambar 1.3 Ekspor Barang dan Jasa Negara ASEAN tahun 2016-2018

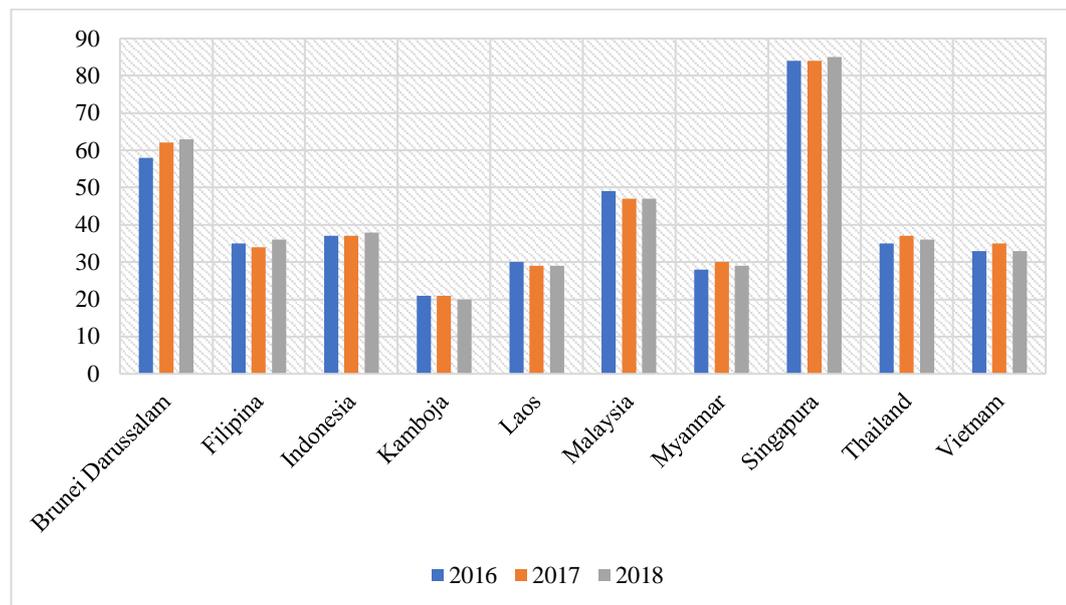
Sumber: Exports of Goods and Services (BoP, Current US\$), World Bank.

Namun dibalik ekspor barang dan jasa negara-negara ASEAN yang meningkat, terdapat permasalahan internal yang menaungi negara-negara ASEAN di sektor publik, salah satunya adalah tingkat korupsi yang masih tinggi. Korupsi menjadi masalah besar yang tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang, namun juga dihadapi oleh beberapa negara maju. Transparency International (2015) dalam laporan *Corruption Perception Index (CPI)* menyatakan bahwa “*Not one single country anywhere in the world is corruption free*” yang berarti bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang bebas dari korupsi.

Dalam memandang hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ekonom pada umumnya menyatakan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan men-distorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Kebanyakan ekonom memandang korupsi menghambat

pembangunan, menyebabkan pendapatan rendah dan menimbulkan jebakan kemiskinan (Blackburn et. al., 2006).

Tingkat korupsi di suatu negara dapat diukur dengan menggunakan indeks korupsi. Indeks yang biasanya digunakan dalam penelitian mengenai hubungan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi adalah *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI). *Corruption perception index* atau indeks persepsi korupsi digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat korupsi di suatu negara dengan menggunakan skala 0 (nol) hingga 100 (seratus), dimana nilai 0 menunjukkan negara tersebut sangat korup (*high corruption*) dan nilai 100 menunjukkan bahwa negara tersebut bersih dari korupsi (*absence of corruption*). Indeks ini fokus pada sektor publik dengan mengevaluasi level korupsi yang dilakukan oleh aparatur publik dan politikus. Gambar 1.4 di bawah ini menampilkan nilai indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) sepuluh negara ASEAN dari tahun 2016-2018.



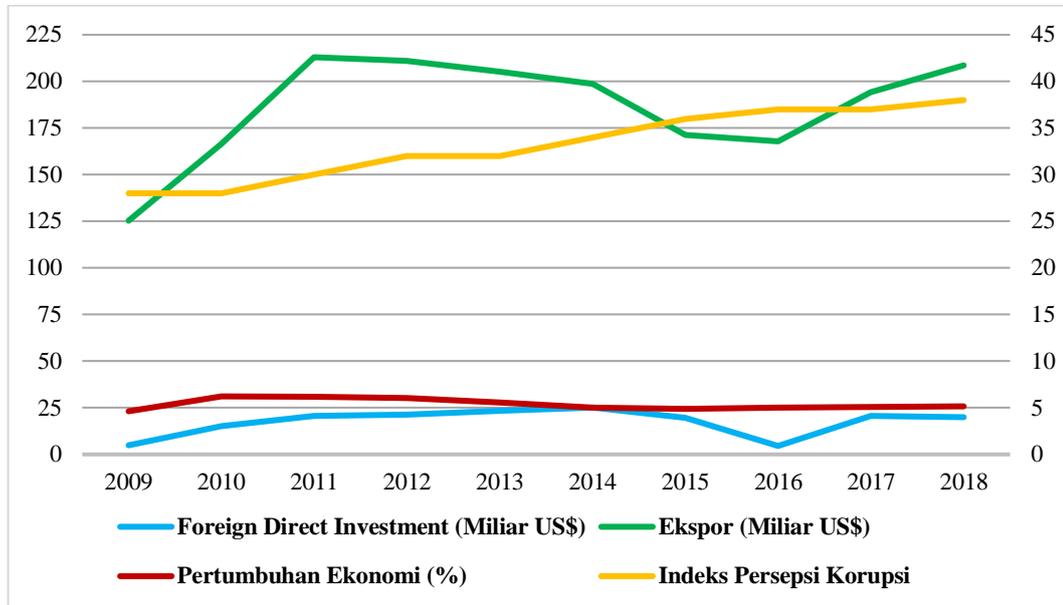
Gambar 1.4 Indeks Persepsi Korupsi Negara ASEAN tahun 2016-2018

Sumber: Corruption Perception Index, Transparency International

Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir indeks persepsi korupsi setiap negara ASEAN tidak mengalami perubahan yang signifikan. Rata-rata indeks persepsi korupsi setiap negara hanya naik atau turun sebesar 1-2 poin. Misalnya Thailand dari tahun 2016 ke 2017 hanya meningkat 2 poin yaitu dari 35 menjadi 37 dan dari tahun 2017 ke 2018 turun 1 poin menjadi 36. Negara ASEAN yang memiliki indeks persepsi korupsi terendah adalah Kamboja dengan nilai indeks persepsi korupsi hanya sebesar 20 di tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Kamboja masih cukup tinggi. Adapun secara umum dapat dilihat pada gambar 1.4 bahwa indeks persepsi korupsi sebagian besar negara ASEAN masih rendah. Rendahnya indeks persepsi korupsi tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih marak terjadi di negara-negara ASEAN setiap tahunnya.

Gambar 1.4 juga menunjukkan bahwa Singapura menjadi negara ASEAN dengan indeks persepsi korupsi tertinggi yaitu mencapai nilai 85 di tahun 2018, artinya Singapura menjadi negara ASEAN dengan tingkat korupsi paling rendah. Singapura juga menjadi satu-satunya negara Asia yang termasuk ke dalam sepuluh negara dengan nilai indeks persepsi korupsi tertinggi di dunia, yakni berada di posisi ketiga bersama dengan Swiss, Swedia dan Finlandia dengan nilai indeks persepsi korupsi sebesar 85 di tahun 2018. Adapun negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi di dunia adalah Denmark dengan nilai 88 di tahun 2018, disusul oleh Selandia Baru di posisi ke dua dengan nilai indeks persepsi korupsi sebesar 87.

Fenomena keterkaitan antara indeks persepsi korupsi, investasi asing langsung (*foreign direct investment*) dan ekspor dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 1.5 di bawah ini.



Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi, *Foreign Direct Investment*, Ekspor dan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2009-2018

Sumber: Worldbank dan Transpaency International, diolah

*** Keterangan:**

- Foreign Direct Investment (Axis Kiri)
- Ekspor (Axis Kiri)
- Pertumbuhan Ekonomi (Axis Kanan)
- Indeks Persepsi Korupsi (Axis Kanan)

Data perkembangan indeks persepsi korupsi, *foreign direct investment*, ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2018 pada Gambar 1.5 memperlihatkan bahwa kenaikan indeks persepsi korupsi dan ekspor dalam tiga tahun terakhir ternyata dibarengi juga oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh atau hubungan positif antara indeks persepsi korupsi dan ekspor dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu Gambar 1.5 juga menunjukkan bahwa menurunnya *foreign direct*

investment (FDI) yaitu dari tahun 2015 ke 2016 berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang malah mengalami kenaikan. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan pandangan para ekonom yang menyatakan bahwa *foreign direct investment* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dari uraian tersebut, terlihat ada permasalahan yang perlu dikaji lebih jauh, yakni terkait dengan pengaruh *foreign direct investment* (FDI), ekspor dan indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), Ekspor dan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara-negara ASEAN dengan judul **“Pengaruh Investasi Asing Langsung, Ekspor dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Bagaimana Pengaruh Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), Ekspor dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara ASEAN?
- 2) Bagaimana Pengaruh Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), Ekspor, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana:

- 1) Pengaruh Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), Ekspor, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara ASEAN.
- 2) Pengaruh Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), Ekspor, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara ASEAN.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi:

- 1) Penulis, sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara teoretis maupun empiris, khususnya mengenai pengaruh investasi asing langsung (*foreign direct investment*), ekspor, dan indeks persepsi korupsi (IPK) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.
- 2) Akademisi dan Peneliti berikutnya, sebagai acuan dan sumber referensi untuk penelitian lebih mendalam mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi asing langsung (*foreign direct investment*), ekspor, dan indeks persepsi korupsi (IPK).
- 3) Pemerintah, sebagai tambahan informasi dalam penyusunan rencana-rencana atau strategi pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

